

**Judul** : Harapan Terakhir Loloskan RUU PPRT Ada di Gerindra  
**Tanggal** : Kamis, 19 September 2024  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 2

## Harapan Terakhir Loloskan RUU PPRT Ada di Gerindra

KOALISI Masyarakat Sipil akan mengadakan dialog dengan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagai tindak lanjut upaya terus mendesak parlemen agar segera mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).  
Aktivis perempuan dan anak sekaligus Ketua Umum Institut Sarinah, Eva K Sundari, me-

ngatakan dialog dijadwalkan berlangsung hari ini di Ruang Perpustakaan DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.  
"Ini adalah kali kedua kegiatan yang diinisiasi Pak Dasco karena kita terus-menerus menekan. Pertama melalui seminar 3 September, lalu dilanjut FGD," ujarnya kepada *Media Indonesia*, kemarin.  
Eva menekankan tidak ada

alasan yang dapat dibenarkan bagi Fraksi di DPR untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) PPRT. Apalagi, para PRT sebagai pekerja telah berusaha hampir 20 tahun meminta hak perlindungan kepada negara. Menurutnya, berbagai kajian dari sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta filsafat dan hukum telah menunjuk-

kan pengesahan RUU PPRT sangat mendesak.

"Ketika tidak disahkan, angka kekerasan juga akan terus melonjak baik bagi PRT dalam negeri maupun luar negeri," ujar Eva.

Eva menjelaskan PDIP dan Golkar telah menolak pengesahan RUU PPRT, sedangkan NasDem dan PKB menyatakan sikap mendukung pengesahan. Dari Gerindra, hingga saat ini belum ada sikap yang nyata sehingga diharapkan dialog bersama hari ini dapat menentukan sikap partai tersebut.

"Ketika tidak disahkan, angka kekerasan juga akan terus melonjak baik bagi PRT (pekerja rumah tangga) dalam negeri maupun luar negeri."

### Eva K Sundari

Ketua Umum Institut Sarinah

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karim menilai RUU PPRT akan dikorbankan demi hajat partai politik dan rezim mendatang.

"Tidak ada insentif politik yang dirasakan parpol maupun rezim dari RUU PPRT ini," cetus Lucius.

Lucius menuturkan tebang pilih pembahasan RUU terli-

hat sangat menonjol pada DPR periode ini yang akan mengakhiri jabatan kurang dari dua pekan lagi. Ia mencontokan perilaku berbeda terhadap RUU Kementerian Negara atau RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Kedua RUU itu diketahui muncul sebagai rencana justru baru pada 2024 dan disahkan hari ini. Sebaliknya, RUU PPRT sejak Maret 2023 akhirnya ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR dan sejak Juli 2024 sudah selesai dibahas di tingkat I. Namun, itu tidak kunjung disahkan. (Dev/Ykb/X-10)